

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Cet.1. Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.
- Asmara, Galang. *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gizeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Balai Aksara, 1995.
- Barata, Atep Adya. *Memahami Pengadilan Pajak “Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukai”*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003.
- _____. *Memahami Prosedur Beracara Di Pengadilan Pajak*. Jakarta : Sociadana, LP3AB-IBTA, 2002.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. Sixth Edition. Centennial Edition (1891-1991). St. Paul, Minnesota : West Group, 1990.
- Boediono. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, 1996.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Darussalam dan Danny Septriadi. *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenaikan Pajak*. Jakarta : Grasindo, 2006.
- Handoko, Rukiah. *Pengantar Hukum Pajak : Seri Buku Ajar*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- _____. *Eksistensi dan Kompetensi Pengadilan Pajak*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bidang Kajian Hukum Pajak, 2003.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Emban Patria, 2001.
- Komariah, Rukiah dan Ali Purwito. *Pengadilan Pajak, Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai*. Cet.1. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

- Mamudji, Sri., Hang Rahardjo, Agus Suprianto, Daly Erni, Dian Pudji N. Simatupang. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Tehnik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Pracetak. Jakarta : Badan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Panggabean, Henry Pandapotan. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966-2003*. Cet.1. Yogyakarta : Liberty, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1985.
- Pudyatmoko, Sri Y. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, Cet.1. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 1986.
- Sadjijono. *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2008.
- Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soemitro, Rochmat. *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Cet.4. Jakarta-Bandung : PT. Eresco, 1976.
- Sugiharti, Dewi Kania. *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*. Cet.1. Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.
- Sumyar. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Cet.1. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004.
- Suparman, Erman. *Kitab Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Fokus Media, 2004.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.

Wojowasito, S. *Kamus Bahasa Indonesia (dengan ejaan yang disempurnakan menurut pedoman Lembaga Bahasa Nasional)*. Bandung : Shinta Dharma, 1972.

II. Tulisan Lain

Gledon, Marry Ann. "The Source Of Law In A Changing Legal Order", *Creighton Law Review*, (Vol. 17, 1984), hal. 633, Dalam Kajian Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., "Pengadilan Pajak : Perbandingan Beberapa Negara Dan Implementasinya Di Indonesia". Pada Lokakarya YALKINDO dengan Kantor Pengadilan Pajak Indonesia, Medan.

Handoko, Rukian. *Eksistensi Pengadilan Pajak*. disampaikan sebagai materi kuliah Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Istiani, Nisa. *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*. 7 Pebruari 2005. www.pemantauperadilan.com

'Korban' Pengadilan Pajak Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. 7 April 2004. <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=10073&cl=Berita>

Mahkamah Agung Diprediksi Sulit Bentuk Pengadilan Perikanan dan PPHI Sesuai Deadline. Selasa, 14 Desember 2004. www.hukumonline.com/detail.asp?id=11626&cl=Berita

MaPPI FHUI. *Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak*. 15 Maret 2005. <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=205&tipe=kolom>

Meski Tak Mengenal Kasasi Pengadilan Pajak Tetap Berpuncak Di Mahkamah Agung. Selasa, 14 Desember 2004. www.hukumonline.com/detail.asp?id=11743%cl=Berita

Nasution, Bismar. *Pengadilan Pajak : Perbandingan Beberapa Negara Dan Implementasinya Di Indonesia*". Kajian Lokakarya YALKINDO dengan Kantor Pengadilan Pajak Indonesia, Medan.

Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan Pajak Belum Berjalan, 8 September 2004. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117&cl=Berita>

Suhendro, Winarto. *Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Sabtu, 3 April 2010. <http://opinidenny.blogspot.com/2010/04/pengadilan-pajak.html>

Sutardjo, F.X.. *Mengenal Pengadilan Pajak (Berdasarkan Undang-Undnag No. 14 Tahun 2002)*. Jakarta : Makalah Pengadilan Pajak, 2006.

Undang-Undang Pengadilan Pajak Harus Direvisi. 14 Desember 2004. <http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/berita.php?cmd=detail&id=20041215135500>

III. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Pajak Bumi Dan Bangunan*. UU No. 12 Tahun 1994. LN No. 62 Tahun 1994, TLN No. 3596.

_____. *Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pengadilan*. UU No. 17 Tahun 1997. LN No. 40 Tahun 1997, TLN No. 3684.

_____. *Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 35 Tahun 1999. LN No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879.

_____. *Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian*. UU No. 43 Tahun 1999. LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

_____. *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 16 Tahun 2000. LN No. 126 Tahun 2000, TLN No. 3984.

_____. *Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. UU No. 19 Tahun 2000. LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987.

_____. *Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*. UU No. 20 Tahun 2000. LN No. 130 Tahun 2000, TLN No. 3988.

_____. *Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UU No. 34 Tahun 2000. LN No. 246 Tahun 2000, TLN No. 1018.

_____. *Undang-Undang Pengadilan Pajak*. UU No. 14 Tahun 2002. LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189.

- _____. *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003. LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.
- _____. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
- _____. *Undang-Undang Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.
- _____. *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.
- _____. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 10 Tahun 2004. LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.
- _____. *Undang-Undang Kepabeanan*. UU No. 17 Tahun 2006. LN No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661.
- _____. *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.
- _____. *Undang-Undang Cukai*. UU No. 39 Tahun 2007. LN No. 105 Tahun 2007, TLN No. 4755.
- _____. *Undang-Undang Pajak Penghasilan*. UU No. 36 Tahun 2008. LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893.
- _____. *Undang-Undang Mahkamah Agung*. UU No. 3 Tahun 2009. LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.
- _____. *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. UU No. 42 Tahun 2009. LN No. 150 Tahun 2009, TLN No. 5069.
- _____. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- _____. *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.
- _____. *Keputusan Presiden tentang Sekretariat Pengadilan Pajak*. Keppres No. 83 Tahun 2003.
- _____. *Keputusan Presiden Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata*

Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung. Keppres No. 21 Tahun 2004.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Permenkeu No. 331/KM 2/2005.*

_____. *Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. : KEP-002/PP/2002 Tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak.*

_____. *Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. : KEP-005 Tahun 2002 Tentang Rincian Biaya Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Pajak.*

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.*

_____. *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B).*

IV. Website

www.depkeu.go.id/peraturan

www.depkeu.go.id/artikel

www.kompas.com/artikel

www.pajak.go.id

www.pemantauperadilan.com

www.setpp.depkeu.go.id